

**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
TAHUN 2021**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA TANGERANG
2022**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021, sebagai tindak lanjut pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang Tahun 2019–2023. LKIP disusun dimaksudkan sebagai wujud pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban berfokus kepada kinerja dan secara terpadu mempertanggungjawabkan keberhasilan, maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah merupakan bentuk pertanggungjawaban dari salah satu tugas dalam melaksanakan seluruh program kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan batasan kewenangan yang telah dilimpahkan (didelegasikan) oleh Walikota Tangerang kepada Kepala Badan dan tugas serta fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan visi, misi dan program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang diaplikasikan ke dalam Visi, Misi dan Program kegiatan Pemerintah Kota Tangerang.

Kami menyadari bahwa penyampaian dan pemaparan materi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini masih belum sempurna, sehingga saran pendapat yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan.

Terakhir kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mambantu dalam proses penyusunan laporan ini, Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua. Amin Ya Robbal'alamin.

**KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA TANGERANG**

**R. IRMAN PUJAHENDRA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196602061986101004**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2
1.3. STRUKTUR ORGANISASI	3
1.4. ISU STRATEGIS	4
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
2.1. RENCANA STRATEGIS	7
2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PERJANJIAN KINERJA	9
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. CAPAIAN KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TANGERANG	11
3.2. ANALISA KINERJA SASARAN STRATEGIS	19
BAB IV. PENUTUP	33
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan akan dapat dikatakan berhasil jika mampu mewujudkan aspirasi dan tuntutan masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita yang diharapkan dengan menerapkan penyelenggaraan *good governance* dan *open governance* yang didukung dengan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate serta dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, *private sector* dan masyarakat. Good governance yang efektif menuntut adanya “*alignment*” (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengamanatkan setiap Pemerintah Daerah diminta untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran.

Bertitik tolak dari RPJMD Kota Tangerang Tahun 2019 – 2023, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2021 serta Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019-2023 dan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021, penyusunan LKIP Tahun 2021 berisi Ikhtisar Pencapaian Sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja perubahan dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD perubahan, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai

atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja, hasil pencapaian sasaran pada Tahun 2021.

1.2 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, kedudukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum dan bertanggung jawab kepada Walikota. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan umum di daerah berdasarkan:

- a. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- b. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang.

1.2.1 Tugas Pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 25 Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) meliputi:

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan,

- keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

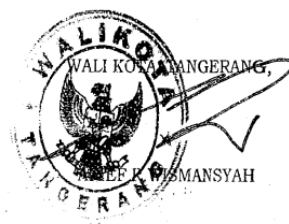
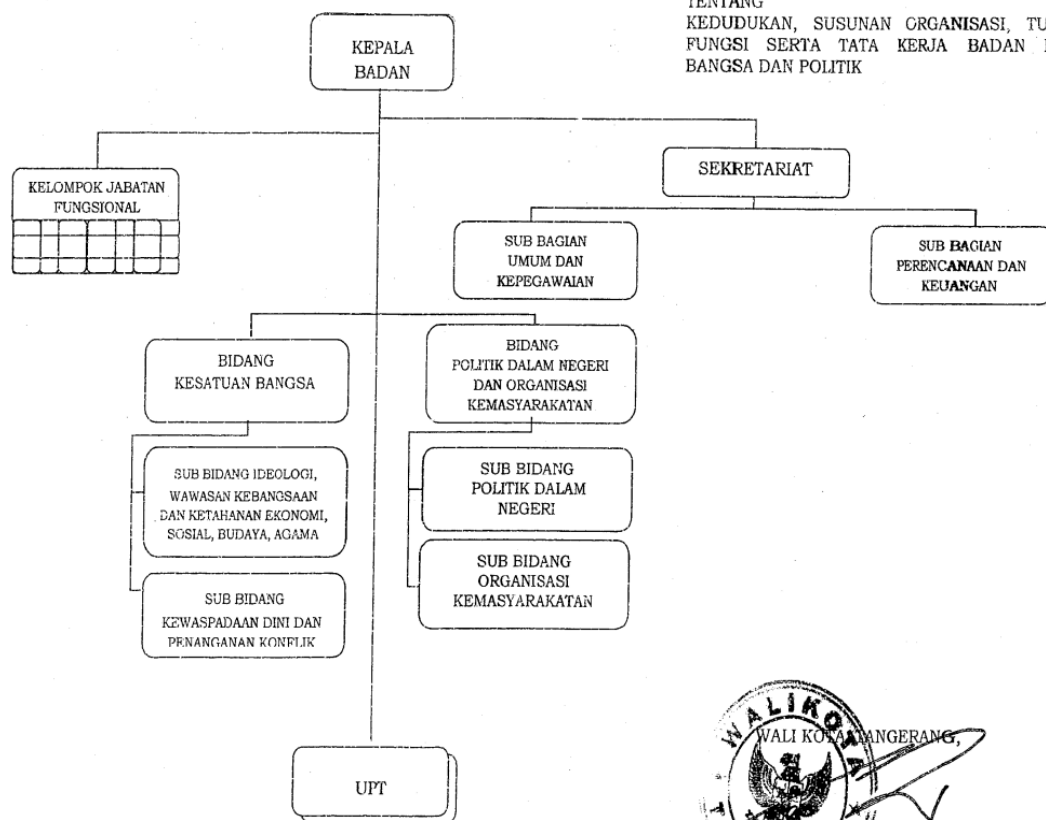
1.3. STUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Tangerang sebagai berikut :

Gambar 1.3. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 64 TAHUN 2019
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK



1.4 ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang Tahun 2020 telah diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Sumber daya manusia yang belum memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas personil dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penanganan konflik yang terjadi di wilayah karena luas wilayah Kota Tangerang dengan 13 Kecamatan dan 104 Kelurahan hanya terdapat 27 PNS dan 24 Tenaga Mitigasi;
2. Sarana dan prasarana yang belum memadai seperti peralatan kantor, peralatan keamanan dan intelijen bagi tenaga mitigasi;
3. Lunturnya nilai kebangsaan dan toleransi antar umat beragama dikalangan masyarakat sehingga memunculkan konflik terutama dalam pendirian rumah ibadah maupun perbedaan aliran dalam suatu agama dan kepercayaan tertentu;
4. Upaya pemberdayaan forum-forum belum memadai karena keterbatasan anggaran dan personil serta adanya pembatasan kegiatan dalam mas pandemi;
5. Peran Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat belum optimal dalam upaya meminimalisasi terjadinya konflik;
6. Partisipasi masyarakat dalam menentukan pilihan di proses Pilkada baik Gubernur maupun Walikota tergolong sedang. Dalam Pilkada Gubernur Banten tahun 2017 tingkat partisipasi masyarakat sebesar 67 %, sedangkan Dalam Pilkada Walikota 2018 partisipasi masyarakat sebesar 71%, masih jauh dari harapan pemerintah pusat sebesar 85% partisipasi masyarakat;
7. Ada potensi kecenderungan terjadinya peningkatan faham-faham dan kelompok radikal yang bersifat transnasional yang dilaksanakan melalui teknologi informasi karena mulai lunturnya pemahaman wawasan kebangsaan dan nilai solidaritas dikalangan masyarakat;
8. Peredaran gelap Narkoba dan penyalahgunaan Narkoba masih tinggi walaupun sudah dibantu oleh Polres Metro Tangerang Kota Melalui Satuan Reserse Narkoba dan BNN Kota Tangerang tetapi penanganan masih belum optimal dikarenakan banyaknya entry Point / Jalur Masuk Bagi Peredaran Narkoba seperti Bandara Soekarno Hatta dan Jalan

Tol serta Perbatasan Wilayah dengan Jakarta, Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan;

9. Jumlah Tenaga Kerja Asing yang semakin meningkat dan pengurangan tenaga kerja lokal serta Upah Minimum Kota yang cukup tinggi sehingga perusahaan lebih memilih daerah yang upah minimum kotanya masih rendah;
10. Permasalahan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berakibat menurunnya kewibawaan pemerintah daerah dan rendahnya respon masyarakat dalam menangkat berbagai friksi sosial politik yang bernuansa kepentingan kelompok maupun golongan karena tingkat penegakan hukum (law inforcement) yang masih rendah dan peningkatan resistensi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah sehingga meningkatnya Demonstrasi Buruh dan Unjuk Rasa Mahasiswa.
11. Masih tingginya konflik dan kekerasan komunal (Conflict and Communal Violence) ditengah masyarakat seperti Pertikaian antar Ormas, antar komunitas dan kelompok masyarakat;
12. Meningkatnya potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dalam menciptakan kondusifitas Kota Tangerang dan tingginya intensitas gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat karena perkembangan dinamika kehidupan masyarakat serta arus globalisasi khususnya dibidang teknolgi informasi, budaya dan ekonomi yang memunculkan dampak negatif dengan munculnya modus kejahatan baru dan kejahatan yang bersifat transnasional serta maraknya peredaran berita bohong (hoax) dan penanganannya.

Berdasarkan RPJMD Kota Tangerang Tahun 2019-2023 OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menunjang terhadap sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dan Pelayanan Publik dengan Indikator Utama Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik dengan target 82.54 Tahun 2021 tercapai sebesar 84,33 % sehingga realisasi sebesar 102 %.

Kota Tangerang merupakan Kota yang Penduduknya sangat kompleks dengan keberagaman baik Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA), tingkat pendidikan, pekerjaan, dan kesejahteraannya, hal ini dapat menjadi kekuatan dan permasalahan.

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Tangerang selama Tahun 2021. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2021 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Bahwa Upaya Pemantauan Kinerja secara berkala saat ini telah dilakukan melalui penggunaan aplikasi sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi untuk melakukan monitoring Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang setiap triwulan terhadap pelaksanaan Program dan kegiatan yang merupakan implementasi Pencapaian Rencana Aksi serta Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.

2.1. RENCANA STRATEGIS

2.1.1. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2019-2023 ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut :

1. Visi Kota Tangerang.

Terwujudnya Kota Tangerang Yang Sejahtera, Berakhlakul Karimah Dan Berdaya Saing.

2. Misi ke 1

Bersama mengembangkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan bersinergitas

3. Tujuan

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik

4. Sasaran

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik

5. Indikator Sasaran

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik.

2.1.2. Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2019-2023 :

1. Tujuan :

“ Meningkatkan Kerukunan dan Toleransi Masyarakat dalam kehidupan Berbangsa dan Bernegara.”

2. Indikator Tujuan : Jumlah Penurunan Konflik Suku, Agama, Ras dan Antar Kelompok/Golongan (SARA).

3. Sasaran

- a. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam Kehidupan Berpolitik dan Demokrasi;
- b. Terjaganya Keutuhan dan Persatuan Bangsa.

4. Indikator Sasaran

- a. 1) Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pemilu.
2) Persentase Ormas Aktif.
- b. Prosentase penurunan kejadian di masyarakat terkait dengan masalah kebangsaan.

5. Strategi

Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mencapai tujuan dan sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat secara individu dan berkelompok dalam kehidupan berpolitik terutama pemilih pemula, kaum perempuan dan kelompok marginal;
- b. Peningkatan Pemahaman terhadap Ideologi dan Wawasan Kebangsaan demi terciptanya Keutuhan, Persatuan Bangsa dikalangan Masyarakat;
- c. Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga Ketahanan Bangsa;
- d. Pembinaan terhadap ormas dapat melaksanakan kegiatan positif dan membantu pemerintah untuk memajukan Kota Tangerang.

6. Arah Kebijakan

Kebijakan yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Pendidikan Politik Masyarakat dalam kehidupan berpolitik serta berdemokrasi;
- b. Meningkatkan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan kepada masyarakat serta meningkatkan kerjasama Aparat Keamanan;
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan penyakit masyarakat.

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PERJANJIAN KINERJA

Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 64 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2019 – 2023, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PERJANJIAN KINERJA Tahun 2021

Misi - I : Bersama Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Peningkatan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dengan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas.

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	PENJELASAN / FORMULASI PENGUKURAN	SATUAN	TARGET
1	<u>Tujuan</u> : Meningkatnya Kerukunan dan Toleransi Masyarakat dalam kehidupan Berbangsa dan Bernegara.	Jumlah Penurunan Konflik Suku, Agama, Ras dan Antar Kelompok/Golongan (SARA)	Jumlah Konflik yang terjadi Tiap Tahun nya	Kasus	46
1.1	<u>Sasaran</u> :	Tingkat Partispasi Masyarakat Dalam Pemilu	Jumlah Pemilih yang menggunakan haknya dibagi jumlah daftar pemilih tetap di kali seratus	%	86,37
1.1.1	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berpolitik dan demokrasi	Prosentase Ormas Aktif	Jumlah Ormas aktif dibagi jumlah ormas yang ada di kali seratus	%	100
1.1.2	Terjaganya Keutuhan dan Persatuan Bangsa	Prosentase Penurunan kejadian di masyarakat terkait dengan masalah kebangsaan	Kejadian di masyarakat dengan masalah kebangsaan seperti adanya radikalisme merupakan sebuah pemahaman / ideologi / gagasan yang ingiin melakukan perubahan sosial dengan menggunakan cara – cara kekerasan / ekstrim kemudian adanya terorisme suatu perbuatan untuk mencapai kekuasaan dari kelompok lain sehingga menjadi lunturnya nilai kebangsaan serta kesatuan.	%	14,29

KODE REKENING	PROGRAM	ANGGARAN
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13,146,922,138.00
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	59,185,000.00
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	3,572,702,000.00
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKAT	185,250,700.00
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	432,719,200.00
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	728,601,100.00
JUMLAH ANGGARAN		18,125,380,138.00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TANGERANG TAHUN 2021.

Capaian kinerja organisasi merupakan tolak ukur keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan, yang didasarkan pada indikator kinerja yang telah ditetapkan. Perbandingan antara kinerja yang dicapai dengan kinerja yang diharapkan atau direncanakan merupakan salah satu bentuk pengukuran kinerja. Pada Tahun 2021 telah ditetapkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Dalam perjanjian kinerja tersebut juga ditetapkan program dan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2021 untuk mencapai kinerja dimaksud. Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 merupakan tolak ukur keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2021 berdasarkan pada pencapaian indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2021. Capaian kinerja pada setiap sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kesbangpol Kota Tangerang Tahun 2021

NO.	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN SASARAN/ PROGRAM	Realisasi 2020	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN %	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Tujuan</u> : Meningkatkan Kerukunan dan Toleransi Masyarakat dalam kehidupan Berbangsa dan Bernegara.	Jumlah Penurunan Konflik Suku, Agama, Ras dan Antar Kelompok/Golongan (SARA)	40 Kasus	46	23	150 %	Rencana - (Realisasi - Rencana) dibagi Rencana dikali 100 % = $46 - (23 - 46) : 46 \times 100\% = 46 - (-23) : 46 = 46+23 : 46 \times 100\% = 150 \%$
	<u>Sasaran</u> : 1.Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berpolitik dan demokrasi.	Tingkat Partispasi Masyarakat Dalam Pemilu	86,37%	86,37%	86.37 %	100%	Jumlah Pemilih yg menggunakan hak suaranya : jumlah DPT X 100% (1.194.369 : 1.382.852 X 100% = 86,37%)
		Prosentase Ormas Aktif	100%	100%	100 %	100%	Jumlah Ormas Awal 151 setelah verifikasi 106 Ormas = $106:106 \times 100\%=100\%$

	2. Terjaganya Keutuhan dan Persatuan Bangsa	Prosentase Penurunan kejadian di masyarakat terkait dengan masalah kebangsaan	14,29 %	14.29%	100 %	699 %	Jumlah kejadian sebelumnya dikurangi kejadian sekarang dibagi jumlah kejadian sebelumnya dikalikan 100% (0-0:0 dikali100=100%) dengan hasil realisasi 100% sehingga capaian menjadi 100 dibagi 14,29 dikali 100 = 699 %
--	---	---	---------	--------	-------	-------	---

Hasil Capaian Indikator Kinerja pada jumlah Jumlah Penurunan Konflik Suku, Agama, Ras dan Antar Kelompok/Golongan (SARA) pada Tahun 2021 dengan Target 46 Kasus dan Realisasi 23 Kasus dengan capaian menjadi 150 %, sehingga terjadi penurunan kasus dari target yang ditetapkan tahun sebelumnya.

Tabel 3.2 Meningkatkan Kerukunan Dan Toleransi Masyarakat Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara.

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Jumlah Penurunan Konflik Suku, Agama, Ras dan Antar Kelompok/Golongan (SARA)	Kasus	60	33	145%	53	40	124,52%	46	23	150%
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran				145%			124,52%			150%

Hasil Indikator Kinerja terkait dengan Jumlah Penurunan Konflik Suku, Agama, Ras dan Antar Kelompok/Golongan (SARA) dari Tahun 2019 dengan Target 60 Kasus dan Realisasi 33 Kasus (145%), Tahun 2020 Target 53 Kasus dan Realisasi 40 Kasus (124,52%) dan Tahun 2021 Target 46 Kasus dan Realisasi 23 Kasus (150%).

A. Uraian Pencapaian Kinerja

Dalam tercapainya tujuan Meningkatkan Kerukunan Dan Toleransi Masyarakat Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara dengan Indikator Kinerja Jumlah Penurunan Konflik Suku, Agama, Ras dan Antar Kelompok/Golongan (SARA) pada Tahun 2021 dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel Data Rekap Konflik Tahun 2021

NO	BULAN	UNJUK RASA	PENANGANAN KONFLIK	PROSENTASE	KONFLIK SUKU	KONFLIK AGAMA	KONFLIK RAS	KONFLIK GOLONGAN / KELOMPOK
1	JANUARI	2	2	100 %	0	0	0	0
2	FEBRUARI	1	1	100 %	0	0	0	0
3	MARET	5	5	0 %	0	0	0	0
4	APRIL	2	2	0 %	0	0	0	1
4	MEI	2	2	0 %	0	0	0	0
5	JUNI	1	1	100 %	0	0	0	1
6	JULI	1	1	100 %	0	0	0	0
7	AGUSTUS	0	0	100 %	0	0	0	0
8	SEPTEMBER	0	0	100 %	0	0	0	1
9	OKTOBER	1	1	100 %	0	0	0	0
10	NOVEMBER	2	2	100 %	0	0	0	1
11	DESEMBER	2	2	100 %	0	0	0	0
JUMLAH		19	19	100 %	0	0	0	4

Berdasarkan tabel tersebut diatas bahwa telah terdata data konflik sebanyak 23 Kasus Konflik selama Januari-Desember 2021 dan adapun kasus yang sudah tertangani sebanyak 23 Kasus Konflik dengan Prosentase 100 %, adapun jenis konflik tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH KONFLIK	JUMLAH PENANGANAN	PROSENTASE
1	KONFLIK UNJUK RASA	19	19	100 %
2	KONFLIK BERDASARKAN SUKU	0	0	0
3	KONFLIK BERDASARKAN AGAMA	0	0	0
4	KONFLIK BERDASARKAN RAS	0	0	0
5	KONFLIK BERDASARKAN GOLONGAN / KELOMPOK	4	4	0
		23	23	100 %

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa telah terjadi 19 unjuk rasa, tertangani 19 Unjuk rasa dengan 0 konflik, sedangkan konflik berdasarkan golongan/kelompok antar agama sebanyak 4 dan yang tertangani 4 konflik.

Adapun daerah rawan konflik di Kota Tangerang dapat dilihat sebagai berikut :

1.	Kecamatan Benda	- Tenaga Kerja Asing - Ormas/LSM vs Toll Jorr - Narkoba - Minuman Keras - Jasa Pengamanan - Bentrokan Antar Kelompok
----	-----------------	---

		- Rumah Ibadah - Curanmor - Jasa Parkir/Pak Ogah
2.	Kecamatan Cibodas	- Penggusuran - Masyarakat VS Pengembang - Banjir - Narkoba - Minuman Keras - Jasa Pengamanan - Rumah Ibadah - Curanmor - Jasa Parkir / Pak Ogah
3.	Kecamatan Karang Tengah	- Kelompok Radikal Kanan - Narkoba - Minuman Keras - Balapan Liar - Banjir - Jasa Pengamanan - Bentrokan Antar Kelompok - Curanmor - Jasa Parkir / Pak Ogah
4.	Kecamatan Larangan	- Kelompok Radikal Kiri - Narkoba - Minuman Keras - Prostitusi - Rumah Ibadah - Ormas / LSM - Banjir - Jasa Pengamanan - Bentrokan Antar Kelompok - Curanmor - Jasa Parkir / Pak Ogah
5.	Kecamatan Neglasari	- Narkoba - Minuman Keras

		- Prostitusi - Tenaga Kerja Asing - Ormas / LSM - Rumah Ibadah - Jasa Pengamanan - Bentrokan Antar Kelompok - Curanmor - Jasa Parkir / Pak Ogah
6.	Kecamatan Periuk	- Narkoba - Banjir - Jasa Pengamanan - Bentrokan Antar Kelompok - Curanmor - Jasa Parkir / Pak Ogah
7.	Kecamatan Pinang	- Kelompok Radikal Kanan - Prostitusi - Narkoba - Minuman Keras - Jasa Pengamanan - Bentrokan Antar Kelompok - Curanmor - Jasa Parkir / Pak Ogah
8.	Kecamatan Batuceper	- Kelompok Radikal Kanan - Narkoba - Minuman Keras - Jasa Pengamanan - Bentrokan Antar Kelompok - Curanmor - Jasa Parkir / Pak Ogah
9.	Kecamatan Ciledug	- Kelompok Radikal Kanan - Banjir

		- Narkoba - Minuman Keras - Rumah Ibadah - Jasa Pengamanan - Bentrokan Antar Kelompok - Curanmor - Jasa Parkir / Pak Ogah
10.	Kecamatan Cipondoh	- Kelompok Radikal Kanan - Banjir - Narkoba - Minuman Keras - Rumah Ibadah - Jasa Pengamanan - Bentrokan Antar Kelompok - Curanmor - Jasa Parkir / Pak Ogah
11.	Kecamatan Jatiuwung	- Perburuhan - Tenaga Kerja Asing - Narkoba - Jasa Pengamanan - Rumah Ibadah - Bentrokan Antar Kelompok - Curanmor - Jasa Parkir / Pak Ogah
12.	Kecamatan Karawaci	- Kelompok Radikal Kanan - Prostitusi - Narkoba - Rumah Ibadah - Jasa Pengamanan - Bentrokan Antar Kelompok - Curanmor - Jasa Parkir / Pak Ogah

13.	Kecamatan Tangerang	- Tawuran Pelajar - Narkoba - Minuman Keras - Jasa Pengamanan - Bentrokan Antar Kelompok - Rumah Ibadah - Gelandangan - Curanmor - Jasa Parkir / Pak Ogah
-----	---------------------	---

Dari kejadian konflik diatas dapat ditangani dengan baik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bekerjasama dengan berbagai jajaran baik Kepolisian, TNI, BIN, Kejaksaan dan Tokoh Masyarakat agar tidak menimbulkan dampak yang meluas.

B. Upaya yang telah dilakukan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi Penyelesaian Konflik, suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) dilakukan melalui Program dan Kegiatan Tahun 2021 :

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan sub kegiatan;
 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan anggaran sebesar Rp. 59.185.000;
2. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan sub kegiatan;
 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah dengan anggaran Rp. 3.549.952.000,-

- Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan anggaran Rp. 22.750.000;
3. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan sub kegiatan:
- Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Rp. 46.718.000
 - Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Rp. 118.801.200
 - Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Rp. 19.731.500
4. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan sub kegiatan;
- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Rp. 78.687.000
 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Rp. 354.032.200
5. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan sub kegiatan;
- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan anggaran Rp. 728.601.100.

C. Permasalahan Yang dihadapi

1. Terorisme dan meningkatnya Radikalisasi, ada kecenderungan terjadinya peningkatan paham-faham dan kelompok radikal yang bersifat transnasional yang dilaksanakan melalui teknologi informasi karena mulai lunturnya pemahaman wawasan kebangsaan dan nilai solidaritas dikalangan masyarakat;
2. Peredaran gelap Narkoba dan penyalahgunaan Narkoba masih tinggi walaupun sudah dibantu oleh Polres Metro Tangerang Kota Melalui Satuan Reserse Narkoba dan BNN Kota Tangerang tetapi Penanganan Masih Belum Optimal dikarenakan banyaknya entry Point / Jalur Masuk Bagi Peredaran Narkoba seperti Bandara Soekarno Hatta dan Jalan Tol serta Perbatasan Wilayah dengan Jakarta, Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan, Pengendalian Peredaran Gelap Narkoba melalui Lapas – lapas yang ada di Kota Tangerang;
3. Belum tersedianya data Tenaga Kerja Asing yang akurat berakibat pada banyaknya pengangguran tenaga kerja lokal karena dan banyaknya perusahaan yang lebih memilih daerah dengan upah minimum rendah;
4. Masih sering terjadinya konflik antar ormas di Kota Tangerang;
5. Belum tersedianya data ormas di Kota Tangerang yang belum valid.

D. Solusi terhadap permasalahan

1. Peningkatan pemahaman masyarakat tetang wawasan kebangsaan, serta sosialisasi tentang deradikalisasi dan bahaya terorisme serta pencegahan paham-paham radikal;
2. Perlunya pembinaan secara langsung dikalangan Masyarakat mulai tingkat RT/RW melalui Pembentukan kampung bersih Narkoba (Bersinar) s.d Tingkat Kota;
3. Perlunya Pengawasan dan pendataan terhadap orang asing yang ada di Kota Tangerang dan menjaga iklim usaha yang kondusif dan kompetitif sehingga pengusaha tidak mengalihkan perusahaannya ke daerah lain;
4. Meningkatkan koordinasi dengan Ketua atau Pengurus Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Kota Tangerang serta dengan jajaran Forkopimda dalam rangka menjaga kondusifitas Kamtibmas Kota Tangerang;
5. Melaksanakan monitoring dan pendataan lebih valid lagi terkait dengan keberadaan Ormas yang aktif di Kota Tangerang dalam rangka menjaga kondusifitas wilayah Kota Tangerang.

3.2. ANALISA KINERJA SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis I : Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berpolitik dan demokrasi.

Gambaran capaian kinerja indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.1 Pengukuran kinerja Sasaran Strategis I

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	REALISASI 2020	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berpolitik dan demokrasi	Tingkat Partispasi Masyarakat Dalam Pemilu	86.37 %	86,37%	86,37%	100%
	Prosentase Ormas Aktif	100%	100%	100%	100%

Tingkat Pencapaian Sasaran Strategis I diatas diukur dengan dua indikator yaitu :

1. Tingkat Partispasi Masyarakat Dalam Pemilu Tahun 2021 dari target nasional sebesar 77,50 % tercapai dengan realisasi sebesar 86,37% atau 100% tingkat keberhasilan capaian dari target;
2. Prosentase Ormas Aktif Tahun 2021 sebesar 100 % dari data awal Tahun 2018 sebanyak 81 Organisasi Kemasyarakatan meningkat menjadi 152 Organisasi Kemasyarakatan sehingga peningkatan terhadap jumlah pendataan dengan capaian sebesar 53,00%.

Sasaran Strategis II : Terjaganya Keutuhan dan Persatuan Bangsa diukur dengan indikator .

Gambaran capaian kinerja indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.2 Pengukuran kinerja Sasaran Strategis II

SASARAN STRATEGIS	SASARAN	REALISASI 2020	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6
Terjaganya Keutuhan dan Persatuan Bangsa	Prosentase Penurunan kejadian di masyarakat terkait dengan masalah kebangsaan	100%	14.29%	100 %	699 %

Terjaganya Keutuhan dan Persatuan Bangsa diukur dengan indikator Prosentase Penurunan kejadian di masyarakat terkait dengan masalah kebangsaan Prosentase Penurunan kejadian di masyarakat terkait dengan masalah kebangsaan dari data awal tahun 2018 sebesar 100% atau 14 kasus ditargetkan Tahun 2021 turun menjadi 0 kasus dengan realisasi 100% atau 0 kasus sehingga capaian kinerja

mencapai 699% karena kasus masalah kebangsaan terkait kejadian di masyarakat menurun dengan penghitungan sebagai berikut Jumlah kejadian sebelumnya dikurangi kejadian sekarang dibagi jumlah kejadian sebelumnya dikalikan 100% (0-0:0 dikali100=100%) dengan hasil realisasi 100% sehingga capaian menjadi 100 dibagi 14,29 dikali 100 = 699 %.

Data tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.3 Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu.

NO	KECAMATAN	JUMLAH DPT	JUMLAH PARTISIPASI PEMILIH	%
1	TANGERANG	111.098	93.587	84,24
2	KARAWACI	125.892	108.572	86,24
3	CIPONDOH	142.313	121.637	85,47
4	PINANG	113.879	101.054	88,74
5	CILEDUG	91.759	82.349	89,74
6	KARANG TENGAH	76.910	66.202	86,08
7	LARANGAN	103.980	87.752	84,39
8	BATUCEPER	62.160	54.339	87,42
9	NEGLASARI	79.414	67.929	85,54
10	BENDA	55.409	48.116	86,84
11	JATIUWUNG	58.925	54.616	92,69
12	CIBODAS	85.870	80.769	94,06
13	PERIUK	86.744	78.188	90,14
	JUMLAH	1.194.369	1.031.583	86,37

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilu di seluruh Kecamatan se Kota Tangerang diatas 77,5 % yang menjadi target tingkat Kota. Partisipasi masyarakat dalam pemilu terendah di kecamatan Tangerang sebesar 84,24% sedangkan yang tertinggi di Kecamatan Cibodas sebesar 94,06%. Hal ini didukung dengan program Pembinaan Wawasan Ketahanan Bangsa dan Politik Dalam Negeri melalui kegiatan pembinaan politik dalam negeri dengan sub kegiatan koordinasi forum-forum diskusi politik sebanyak 300 peserta dari pengurus partai politik, Diskusi dan seminar dan partisipasi perempuan dalam partai politik sebanyak 300 orang dari pengurus partai politik perempuan dan organisasi kemasyarakatan perempuan, Kesadaran Demokrasi Untuk Pemilih Pemula sebanyak 300 peserta dari

siswa SLTA serta kegiatan keliling kampung yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik beserta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangerang.

Data Ormas Tahun 2020 dan 2021 yang berbadan hukum maupun memiliki Surat Keterangan Terdaftar dari Kementerian Dalam Negeri dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.4 Data Ormas Berbadan Hukum dan Ber SKT

NO	TAHUN 2020		TAHUN 2021		KETERANGAN
	Ormas BH	Ormas SKT	Ormas BH	Ormas SKT	
1	47	70	81	71	77,00 %
2	117		152		

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan jumlah ormas dari 117 menjadi 152, kenaikan yang signifikan terjadi pada ormas berbadan hukum dari 47 menjadi 81 Sehingga dari target 100%. Data Ormas berjumlah 152 terdiri dari Ormas aktif yang terdaftar Badan Kesbangpol berjumlah 81 berbadan Hukum (BH) sedangkan Ormas aktif yang masuk dalam kategori Surat Keterangan Terdaftar (SKT) berjumlah 71 jadi totalnya berjumlah 152 Ormas yang terdaftar dan berbadan hukum di Badan Kesbangpol Kota Tangerang, dalam Capaian ini didukung melalui Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan sub Kegiatan :

- Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Rp. 46.718.000;
- Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Rp. 118.801.200;
- Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Rp. 19.731.500.

Tabel 3.2.5 Data Kejadian di Masyarakat Terkait Masalah Kebangsaan :

NO	PERMASALAHAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	KET
1	Ideologi	0	0	0	
2	Politik	2	0	0	
3	Sosial	8	0	0	
4	Budaya	0	0	0	
5	Pertahanan dan Keamanan	2	0	0	
Jumlah		12	0	0	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 tidak terdapat kejadian permasalahan kebangsaan terkait ideologi dan budaya. Penurunan jumlah kasus tersebut didukung dengan program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dengan kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.

1. Permasalahan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berakibat menurunnya kewibawaan pemerintah daerah dan rendahnya respon masyarakat dalam menangkai berbagai friksi sosial politik yang bernuansa kepentingan kelompok maupun golongan karena tingkat penegakan hukum (law inforcement) yang masih rendah dan peningkatan resistensi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah sehingga meningkatnya Demonstrasi Buruh dan Unjuk Rasa Mahasiswa.
2. Masih tingginya konflik dan kekerasan komunal (Conflict and Communal Violence) ditengah masyarakat seperti Pertikaian antar Ormas, antar komunitas dan kelompok masyarakat;
3. Meningkatnya potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dalam menciptakan kondusifitas Kota Tangerang dan tingginya intensitas gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat karena perkembangan dinamika kehidupan masyarakat serta arus globalisasi khususnya dibidang teknologi informasi, budaya dan ekonomi yang memunculkan eksek negatif dengan munculnya modus kejahatan baru dan kejahatan yang bersifat transnasional serta maraknya peredaran berita bohong (hoax) dan penanganannya.

4. Terorisme dan meningkatnya Radikalisasi, ada kecenderungan terjadinya peningkatan paham-paham dan kelompok radikal yang bersifat transnasional yang dilaksanakan melalui teknologi informasi karena mulai lunturnya pemahaman wawasan kebangsaan dan nilai solidaritas dikalangan masyarakat;
5. Peredaran gelap Narkoba dan penyalahgunaan Narkoba masih tinggi walaupun sudah dibantu oleh Polres Metro Tangerang Kota Melalui Satuan Reserse Narkoba dan BNN Kota Tangerang tetapi Penanganan Masih Belum Optimal dikarenakan banyaknya entry Point / Jalur Masuk Bagi Peredaran Narkoba seperti Bandara Soekarno Hatta dan Jalan Tol serta Perbatasan Wilayah dengan Jakarta, Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan, Pengendalian Peredaran Gelap Narkoba melalui Lapas – lapas yang ada di Kota Tangerang.

REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

Program/Kegiatan RKPD 2021						Program/Kegiatan Yang Diselaraskan RPJMD 2019-2023				
NO	Uraian	Anggaran		%	Indikator	Uraian	Anggaran		%	Indikator
		Target	Realisasi				Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.146.922.138,00	10.600.585.127,00	80,63%	Tingkat Ketersediaan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.146.922.138,00	10.600.585.127,00	80,63%	Tingkat Ketersediaan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>8.538.971.806,00</i>	<i>6.295.816.897,00</i>	<i>73,73%</i>	<i>Tingkat Ketersediaan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran</i>	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>8.538.971.806,00</i>	<i>6.295.816.897,00</i>	<i>73,73%</i>	<i>Tingkat Ketersediaan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran</i>
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>171.930.400</i>	<i>161.213.000</i>	<i>93,77%</i>	<i>Tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah</i>	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>171.930.400</i>	<i>161.213.000</i>	<i>93,77%</i>	<i>Tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah</i>
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>1.590.769.236,00</i>	<i>1.547.084.630,00</i>	<i>97,25%</i>	<i>Tingkat Ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran</i>	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>1.590.769.236,00</i>	<i>1.547.084.630,00</i>	<i>97,25%</i>	<i>Tingkat Ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran</i>
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>1.993.691.080,00</i>	<i>1.795.559.347,00</i>	<i>90,06%</i>	<i>Tingkat Ketersediaan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran</i>	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>1.993.691.080,00</i>	<i>1.795.559.347,00</i>	<i>90,06%</i>	<i>Tingkat Ketersediaan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran</i>
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>851.559.616,00</i>	<i>800.911.253,00</i>	<i>94,05%</i>	<i>Tingkat ketersediaan pelayanan jasa rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah</i>	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>851.559.616,00</i>	<i>800.911.253,00</i>	<i>94,05%</i>	<i>Tingkat ketersediaan pelayanan jasa rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah</i>

PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	59.185.000,00	45.585.000,00	77,02%	Tingkat pencegahan konflik melalui mediasi	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	59.185.000,00	45.585.000,00	77,02%	Tingkat pencegahan konflik melalui mediasi
<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	59.185.000,00	45.585.000,00	77,02%	<i>Tingkat pencegahan konflik melalui mediasi</i>	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	59.185.000,00	45.585.000,00	77,02%	<i>Tingkat pencegahan konflik melalui mediasi</i>
<i>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>	59.185.000,00	45.585.000,00	77,02%	- Jumlah Pelaksanaan Monitoring Kerukunan Antar Suku Di Wilayah 12 Kegiatan	- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	59.185.000,00	45.585.000,00	77,02 %	- Jumlah Pelaksanaan Monitoring Kerukunan Antar Suku Di Wilayah 12 Kegiatan
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	3.572.702.000,00	3.572.702.000,00	100,00%	Tingkat Kemitraan Partai Politik dan Organisasi Kemasayarakatan dalam Pendidikan Politik Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	3.572.702.000,00	3.572.702.000,00	100,00%	Tingkat Kemitraan Partai Politik dan Organisasi Kemasayarakatan dalam Pendidikan Politik Masyarakat
<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik,</i>	3.572.702.000,00	3.572.702.000,00	100,00%	<i>Tingkat Kemitraan Partai Politik dan Organisasi Kemasayarakatan dalam Pendidikan</i>	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik,</i>	3.572.702.000,00	3.572.702.000,00	100,00%	<i>Tingkat Kemitraan Partai Politik dan Organisasi Kemasayarakatan dalam Pendidikan</i>

<i>Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</i>				<i>Politik Masyarakat</i>	<i>Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</i>				<i>Politik Masyarakat</i>
<i>Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah</i>	3.549.952.000,00	3.549.952.000,00	100,00%	- Bantuan Keuangan Partai Politik Jumlah Suara Partai Politik 887488 persuara - Jumlah Peserta Kegiatan Diskusi dan Seminar Partisipasi Perempuan Dalam Partai Politik 0 Orang	- Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	3.549.952.000,00	3.549.952.000,00	100,00%	- Bantuan Keuangan Partai Politik Jumlah Suara Partai Politik 887488 persuara - Jumlah Peserta Kegiatan Diskusi dan Seminar Partisipasi Perempuan Dalam Partai Politik 0 Orang
<i>Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan</i>	22.750.000,00	22.750.000,00	100,00%	- Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Rapat Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik 1 Orang	- Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	22.750.000,00	22.750.000,00	100,00 %	- Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Rapat Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik 1 Orang

<i>Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>				-Jumlah Peserta Debat Konstitusi Politik 0 Orang -Jumlah Peserta Koordinasi Forum -forum Diskusi Politik 0 Orang -Jumlah Peserta Sosialisasi Pertemuan Kerjasama Antar Lembaga Pemerintah , Parpol, Ormas dan LSM 0 Orang	<i>Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>				-Jumlah Peserta Debat Konstitusi Politik 0 Orang -Jumlah Peserta Koordinasi Forum -forum Diskusi Politik 0 Orang -Jumlah Peserta Sosialisasi Pertemuan Kerjasama Antar Lembaga Pemerintah , Parpol, Ormas dan LSM 0 Orang
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	156.734.600,00	156.734.600,00	84,61%	Tingkat Kemitraan Partai Politik dan Organisasi Kemasayarakatan dalam Pendidikan Politik Masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	156.734.600,00	156.734.600,00	84,61%	Tingkat Kemitraan Partai Politik dan Organisasi Kemasayarakatan dalam Pendidikan Politik Masyarakat
<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	156.734.600,00	156.734.600,00	84,61%	<i>Tingkat Kemitraan Partai Politik dan Organisasi Kemasayarakatan dalam Pendidikan Politik Masyarakat</i>	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	156.734.600,00	156.734.600,00	84,61%	<i>Tingkat Kemitraan Partai Politik dan Organisasi Kemasayarakatan dalam Pendidikan Politik Masyarakat</i>
<i>Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>	46.718.000,00	46.718.000,00	100,00%	<i>Jumlah Pelaksanaan Validasi Data Ormas dan LSM 1 Kegiatan</i>	<i>Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>	46.718.000,00	46.718.000,00	100,00%	<i>Jumlah Pelaksanaan Validasi Data Ormas dan LSM 1 Kegiatan</i>
<i>Pelaksanaan</i>	90.285.600,00	90.285.600,00	76,00%	- Jumlah Peserta	<i>- Pelaksanaan</i>	90.285.600,00	90.285.600,00	76,00%	- Jumlah Peserta

<i>Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>				Kemitraan bagi PWRI (Fasilitas PWRI Kota Tangerang) 30 Orang - Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan Kemitraan Bagi Ormas dan LSM Di Kota Tangerang 0 Orang	<i>Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>				Kemitraan bagi PWRI (Fasilitas PWRI Kota Tangerang) 30 Orang - Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan Kemitraan Bagi Ormas dan LSM Di Kota Tangerang 0 Orang
<i>Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>	19.731.000,00	19.731.000,00	100,00%	- Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Hibah bagi Ormas dan LSM 1 kegiatan - Jumlah Pelaksanaan Monitoring Pelaksanaan Hibah (Ormas dan LSM yang Mendapatkan Bantuan Keuangan HIBAH) 5 Kegiatan	<i>- Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>	19.731.000,00	19.731.000,00	100,00%	- Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Hibah bagi Ormas dan LSM 1 kegiatan - Jumlah Pelaksanaan Monitoring Pelaksanaan Hibah (Ormas dan LSM yang Mendapatkan Bantuan Keuangan HIBAH) 5 Kegiatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	432.719.200,00	392.919.500,00	90,80%	Tingkat pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	432.719.200,00	392.919.500,00	90,80%	Tingkat pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi,</i>	432.719.200,00	392.919.500,00	90,80%	Tingkat pemberantasan penyakit	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan</i>	432.719.200,00	392.919.500,00	90,80%	Tingkat pemberantasan penyakit

	<i>Sosial dan Budaya</i>				masyarakat (pekat)	<i>Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>				masyarakat (pekat)
	<i>Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>	78.687.000,00	77.838.000,00	98,92%	<i>-Jumlah Tim Penyusun Rapeda Penyalahgunaan Narkoba (10 Orang x 3 Kegiatan) 30 Orang</i>	<i>Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>	78.687.000,00	77.838.000,00	98,92%	<i>-Jumlah Tim Penyusun Rapeda Penyalahgunaan Narkoba (10 Orang x 3 Kegiatan) 30 Orang</i>
	<i>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>	354.032.200,00	315.081.500,00	89,00%	<i>-Jumlah Kegiatan Monitoring dan Verifikasi Ijin Pendirian Rumah Ibadah 4 Kegiatan -Jumlah Pelaksanaan Pertemuan Mingguan dan Piket FKUB Kota Tangerang 924 Hari -Jumlah Peserta Dialog Pemeliharaan Kerukunan Tokoh Agama, OKP dan Tokoh Masyarakat 50 Orang -Jumlah Peserta Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan umat</i>	<i>-Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>	354.032.200,00	315.081.500,00	89,00%	<i>-Jumlah Kegiatan Monitoring dan Verifikasi Ijin Pendirian Rumah Ibadah 4 Kegiatan -Jumlah Pelaksanaan Pertemuan Mingguan dan Piket FKUB Kota Tangerang 924 Hari -Jumlah Peserta Dialog Pemeliharaan Kerukunan Tokoh Agama, OKP dan Tokoh Masyarakat 50 Orang -Jumlah Peserta Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan umat</i>

					Beragam 0 Orang -Jumlah Peserta Rapat Rapat Kerja Akhir Tahun Penyusunan Strategis FKUB Kota Tangerang 17 Orang -Jumlah Peserta Sosialisasi PBM Pada Tokoh Agama dan Ketua RW Se-Kota Tangerang 50 Orang					Beragam 0 Orang -Jumlah Peserta Rapat Rapat Kerja Akhir Tahun Penyusunan Strategis FKUB Kota Tangerang 17 Orang -Jumlah Peserta Sosialisasi PBM Pada Tokoh Agama dan Ketua RW Se-Kota Tangerang 50 Orang
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	728.601.100,00	727.326.100,00	99,83%	Tingkat Pencegahan Konflik Melalui Mediasi	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	728.601.100,00	727.326.100,00	99,83%	Tingkat Pencegahan Konflik Melalui Mediasi
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	<i>728.601.100,00</i>	<i>727.326.100</i>	<i>99,83%</i>	Tingkat Pencegahan Konflik Melalui Mediasi	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	<i>728.601.100,00</i>	<i>727.326.100</i>	<i>99,83%</i>	Tingkat Pencegahan Konflik Melalui Mediasi
	<i>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi</i>	<i>728.601.100,00</i>	<i>727.326.100,00</i>	<i>99,83%</i>	- Fasilitasi FKDM Tim Monitoring Kewilayahan Kota Tangerang 2 Bulan - Fasilitasi FKDM Tim Monitoring Kewilayahan Tingkat Kecamatan 13 Kecamatan - Jumlah	<i>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan</i>	<i>728.601.100,00</i>	<i>727.326.100,00</i>	<i>99,83%</i>	- Fasilitasi FKDM Tim Monitoring Kewilayahan Kota Tangerang 2 Bulan - Fasilitasi FKDM Tim Monitoring Kewilayahan Tingkat Kecamatan 13 Kecamatan - Jumlah

	<i>Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>				Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 9 Bulan Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat 9 Bulan Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Organisasi Asing dan Tenaga Asing serta Organisasi Asing 4 Bulan	<i>Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>				Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 9 Bulan Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat 9 Bulan Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Organisasi Asing dan Tenaga Asing serta Organisasi Asing 4 Bulan
		18.125.380.138,00	15.495.852.327	85,49%			18.125.380.138,00	15.495.852.327	85,49%	

BAB IV

PENUTUP

	TARGET	REALISASI	CAPAIAN INDIKATOR TAHUN BERJALAN (%)	KETERANGAN
1	2	3	4 = 3/2	5
Jumlah Penurunan Konflik Suku, Agama, Ras dan Antar Kelompok/Golongan (SARA)	46	23	150	
Tingkat Partispasi Masyarakat Dalam Pemilu	86,37	86.37	86,37	
Prosentase Ormas Aktif	100	100	100	
Prosentase Penurunan kejadian di masyarakat terkait dengan masalah kebangsaan	14.29	100	699	

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sebagaimana BAB sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Membantu Walikota Dalam Melaksanakan Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Sesuai Dengan Visi, Misi Dan Program Walikota Sebagaimana Dijabarkan Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Indikator Kinerja Utama Meningkatkan Kerukunan dan Toleransi Masyarakat dalam kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Capaian Indikator Tujuan tahun 2021 yaitu Jumlah Penurunan Konflik Suku, Agama, Ras dan Antar Kelompok/Golongan (SARA) dari taget yang ditetapkan sebanyak 46 kasus dapat diminimalisasi menjadi 23 kasus sehingga capaian sebesar 150 %.

Sasaran Strategis I : Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berpolitik dan demokrasi diukur dengan dua indikator yaitu :

1. Tingkat Partispasi Masyarakat Dalam Pemilu Tahun 2021 dari target sebesar 77,50 % dengan realisasi sebesar 86,37% atau 100% tingkat keberhasilan capaian dari target. Jika dibandingkan dengan tahun 2018 realisasi sebesar 71% maka tingkat capaian Tahun 2021 sebesar 121,65%;
2. Prosentase Ormas Aktif Tahun 2021 sebesar 100 % dari data awal Tahun 2018 sebanyak 81 Organisasi Kemasyarakatan meningkat menjadi 152 Organisasi Kemasyarakatan sehingga tingkat keberhasilan capaian sebesar 100,00%.

Sasaran Strategis II : Terjaganya Keutuhan dan Persatuan Bangsa diukur dengan indikator Prosentase Penurunan kejadian di masyarakat terkait dengan masalah kebangsaan Prosentase Penurunan kejadian di masyarakat terkait dengan masalah kebangsaan dari data awal tahun 2018 sebesar 100% atau 14 kasus ditargetkan Tahun 2021 turun menjadi 0 kasus dengan realisasi 14,29% atau 0 kasus sehingga capaian kinerja mencapai 100% karena kasus masalah kebangsaan terkait kejadian di masyarakat dapat diturunkan.

Dilihat dari Realisasi dan keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang Tahun 2021 dengan Anggaran sebesar Rp. 18.125.380.138,00 dan Realisasi sebesar Rp. 15.495.852.327 dengan Capaian Sebesar Rp. 85,49%.

Secara umum capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang dalam kategori baik. Hal ini menunjukkan keberhasilan pencapaian dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Keberhasilan capaian kinerja telah dilakukan analisis dan evaluasi sehingga diketahui langkah-langkah strategis yang harus dilaksanakan dalam meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya. Demikian halnya koordinasi dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait akan terus ditingkatkan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang yang telah ditetapkan. Pendidikan politik masyarakat agar terus dapat dijalankan dengan baik sehingga dapat meningkatkan peran aktif masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi, kerjasama dan kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan agar terus ditingkatkan sehingga dapat berperan serta dalam pembangunan Kota Tangerang yang lebih baik.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang yang menggambarkan Capaian Kinerja pada Tahun 2021 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Tangerang.

Tangerang, Januari 2022

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KOTA TANGERANG**

R.IRMAN PUJAHENDRA

Pembina Utama Muda / IV C
NIP. 196602061986101004